



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA
INDONESIAN PROCUREMENT LAWYERS' ASSOCIATION
(DPN APPI)

Kantor : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jl. Menteng Raya No.29
Jakarta Pusat 10340, Telp/Fax: (021) 3142717,

Email: sekretariat.dpnappi@gmail.com,

FB Pages: www.facebook.com/DpnAppi Website: <http://dpnappi.org>

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 93/A/Sek/DPN-APPI/03/2019
KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA
(DPN APPI) PERIODE 2016-2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN BAGI AHLI HUKUM
KONTRAK PENGADAAN DAN PENGACARA PENGADAAN YANG TERDAFTAR
DI ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA (APPI)

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Periode 2016-2021 dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ini mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Standar Biaya Pendampingan Bagi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Pengacara Pengadaan yang Terdaftar di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia setelah:

- Menimbang** : Bahwa demi berlanjutnya proses pelaksanaan misi dan visi Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Pendampingan Bagi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Pengacara Pengadaan yang Terdaftar di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, 5, 6 dan 7 Anggaran Dasar APPI;
2. Pasal 2, 6, 7 dan 9 Anggaran Rumah Tangga APPI.
- Memperhatikan** : Masukan dan saran dari Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) pada tanggal 20 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Standar Biaya Pendampingan Bagi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Pengacara Pengadaan yang Terdaftar di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia sebagai acuan/pedoman bagi anggota APPI dalam mengajukan penawaran pendampingan hukum ke instansi pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia;
2. Menetapkan Standar Biaya Pendampingan Bagi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Pengacara Pengadaan yang Terdaftar di Asosiasi Pengacara Pengadaan



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA
INDONESIAN PROCUREMENT LAWYERS' ASSOCIATION
(DPN APPI)

Kantor : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jl. Menteng Raya No.29

Jakarta Pusat 10340, Telp/Fax: (021) 3142717,

Email: sekretariat.dpnappi@gmail.com,

FB Pages: www.facebook.com/DpnAppi Website: <http://dpnappi.org>

- Indonesia ini sebagai ambang batas terendah dalam memberikan jasa pendampingan di berbagai instansi pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia.
3. Menginstruksikan kepada semua Pengurus DPN APPI, DPW APPI, DPC APPI dan anggota APPI di seluruh Indonesia untuk mematuhi Standar Biaya Pendampingan Bagi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Pengacara Pengadaan yang Terdaftar di APPI yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI);
 3. Demikianlah surat keputusan ini dibuat dan dikeluarkan serta berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya surat ini, hal-hal yang belum jelas dan belum lengkap akan diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan dan surat keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) lainnya;
 4. Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari.

Jakarta, 21 Maret 2019

PENGURUS
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA (DPN APPI)
PERIODE 2016-2021

SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE
KETUA UMUM



SUTANTO,S.H.,M.H.,CLA.,CPL.
SEKRETARIS JENDERAL



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA
INDONESIAN PROCUREMENT LAWYERS' ASSOCIATION
(D P N A P P I)

Kantor : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jl. Menteng Raya No.29
Jakarta Pusat 10340, Telp/Fax: (021) 3142717,
Email: sekretariat.dpnappi@gmail.com,
FB Pages: www.facebook.com/DpnAppi Website: <http://dpnappi.org>

STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA

I. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN

A. AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN (PERSEORANGAN)

1. Sarjana Hukum (S.H)/sederajat
2. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun
3. Memiliki sertifikat Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang diberikan oleh International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA)
4. Biaya Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) termasuk pajak (pph).

B. AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN (BADAN USAHA)

1. Memiliki ijin operasional dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar sebagai Firma Hukum di APPI
2. Memiliki minimal 3 (tiga) orang Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh International Federation of Procurement Bar Association (IFPBA)
3. Biaya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk pajak (ppn + pph).

II. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN NON – LITIGASI PENGACARA PENGADAAN

A. PENGACARA PENGADAAN (PERSEORANGAN)

1. Sarjana Hukum (S.H)/sederajat
2. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun
3. Memiliki sertifikat Pengacara Pengadaan (Certified Procurement Lawyer/CPL) yang diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)
4. Biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk pajak (pph).

B. PENGACARA PENGADAAN (BADAN USAHA)

1. Memiliki ijin operasional dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar sebagai Firma Hukum di APPI
2. Memiliki minimal 3 (tiga) orang Pengacara Pengadaan (Certified Procurement Lawyer/CPL) yang sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM).
3. Biaya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk pajak (ppn + pph).



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA
INDONESIAN PROCUREMENT LAWYERS' ASSOCIATION
(D P N A P P I)

Kantor : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jl. Menteng Raya No.29
Jakarta Pusat 10340, Telp/Fax: (021) 3142717,
Email: sekretariat.dpnappi@gmail.com,
FB Pages: www.facebook.com/DpnAppi Website: <http://dpnappi.org>

III. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN LITIGASI PENGACARA PENGADAAN

A. PENGACARA PENGADAAN (PERSEORANGAN)

1. Sarjana Hukum (S.H)/sederajat
2. Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun
3. Memiliki sertifikat Pengacara Pengadaan (Certified Procurement Lawyer/CPL) yang diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)
4. Biaya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk pajak (pph) untuk tingkat Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama).
5. Biaya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk pajak (pph) untuk tingkat Pengadilan Banding.
6. Biaya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk pajak (pph) untuk tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
7. Biaya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) termasuk pajak (pph) untuk upaya Peninjauan Kembali (PK).

NB:

- Apabila bergelar Magister Hukum (M.H) dan minimal berpengalaman 5 (lima) tahun maka biaya di tambah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tingkatan Pengadilan.
- Apabila bergelar Doktor (S3) dan minimal berpengalaman 5 (lima) tahun maka biaya di tambah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tingkatan Pengadilan.
- Biaya pendampingan di atas berlaku untuk wilayah Jabodetabek. Khusus untuk pendampingan di luar wilayah Jabodetabek maka biaya transportasi lokal, transportasi udara (jika ada), biaya konsumsi, biaya per diem dan biaya akomodasi di berikan sesuai dengan kesepakatan antara Pengacara Pengadaan yang bersangkutan dan calon klien.

B. PENGACARA PENGADAAN (BADAN USAHA)

1. Memiliki ijin operasional dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar sebagai Firma Hukum di APPI
2. Memiliki minimal 3 (tiga) orang Pengacara Pengadaan (Certified Procurement Lawyer/CPL) yang sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM).
3. Biaya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak (ppn + pph) untuk tingkat Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat Pertama)
4. Biaya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak (ppn + pph) untuk tingkat Pengadilan Banding.
5. Biaya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak (ppn + pph) untuk tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
6. Biaya Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) termasuk pajak (pph) untuk upaya Peninjauan Kembali (PK).



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA
INDONESIAN PROCUREMENT LAWYERS' ASSOCIATION
(D P N A P P I)

Kantor : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jl. Menteng Raya No.29
Jakarta Pusat 10340, Telp/Fax: (021) 3142717,
Email: sekretariat.dpnappi@gmail.com,
FB Pages: www.facebook.com/DpnAppi Website: <http://dpnappi.org>

NB:

- Apabila bergelar Magister Hukum (M.H) dan minimal berpengalaman 5 (lima) tahun maka biaya di tambah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di setiap tingkatan Pengadilan.
- Apabila bergelar Doktor (S3) dan minimal berpengalaman 5 (lima) tahun maka biaya di tambah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di setiap tingkatan Pengadilan.
- Biaya pendampingan di atas berlaku untuk wilayah Jabodetabek. Khusus untuk pendampingan di luar wilayah Jabodetabek maka biaya transportasi lokal, transportasi udara (jika ada), biaya konsumsi, biaya per diem dan biaya akomodasi di berikan sesuai dengan kesepakatan antara Pengacara Pengadaan yang bersangkutan dan calon klien.

Demikianlah Standar Biaya Umum Pendampingan bagi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan Pengacara Pengadaan yang terdaftar di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI). Semoga dapat menjadi panduan/pedoman bagi semua Ahli Hukum Kontrak Pengadaan dan/atau Pengacara Pengadaan yang terdaftar di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dalam mengajukan penawaran pendampingan di semua instansi pemerintah dan swasta di seluruh Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Maret 2019

PENGURUS
DEWAN PIMPINAN NASIONAL
ASOSIASI PENGACARA PENGADAAN INDONESIA (DPN APPI)
PERIODE 2016-2021

SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE
KETUA UMUM



SUTANTO,S.H.,M.H.,CLA.,CPL.
SEKRETARIS JENDERAL